

# MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

## I. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bungo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang letaknya paling Barat Provinsi Jambi, bertabas langsung dengan Provinsi Sumatera Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Kabuaten Bungo pada Tahun 2024 dengan jumlah penduduk sebesar 376, 91 Jiwa, angka pengangguran tahun 2024 sebesar 4,67 %. Bila dikomparasi dengan angka pengangguran di Kabupaten tetangga yang secara demografi dan geologi hampir sama yaitu Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 angka penganggurannya sebesar 4,18 % lebih rendah dari Kabupaten Bungo sebesar 0,49 % (Bungo Dalam Angka 2025).

### 1.1. Informasi tentang masalah yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah

Sejauhmana kesejahteraan masyarakat suatu daerah salah satunya adalah dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada Tahun 2024 sebesar 4,30 % atau melambat dari angka tahun sebelumnya sebesar 4,66 % atau 0,36 poin, Ada beberap factor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo melambat antara lain meningkatnya angka pengangguran, sebagaimana penelitian Irawan dkk (2024) Pengangguran mempunyai dampak yang merugikan yang cukup besar. kurangnya pekerja berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Lapangan usaha yang mengalami perlambatan di Kabupaten Bungo yaitu menurunnya sektor tambang, berimbas kepada naiknya angka pengangguran. Untuk melihat pergerakan perekonomian Kabupaten Bungo dapat dilihat dari PDRB Tahun 2024 seperti tabel 1.1.

Tabel : 1.1. Lapangan Usaha yang mengalami perlambatan pada Tahun 2024.

No.	Jenis Lapangan usaha	PDRB Tahun 2023	PDRB Tahun 2024
1.	Pertambangan & Energi	2,76	-7,37
2.	Pengadaan Listrik & Gas	9,65	6,88

3.	Pengadaan Air, Sampah dan Daur Ulang	4,01	3,37
4.	Perdagangan Besar & Eceran Reparasi Mobil dan Motor	9,19	4,93
5.	Informasi dan Komunikasi	7,35	5,00

## 1.2. Latar belakang permasalahan, dan teori yang berkaitan dengan masalah

Menurut Wijayanti Ega Nanda Laksono (2024) Teori pertumbuhan baru mencoba memadukan semua faktor yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi serta kebijakan pemerintah sebagai penentu pertumbuhan. Beberapa kajian juga menjelaskan tentang pentingnya sumberdaya manusia, sumber daya alam dan sumberdaya modal dalam mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi (Rahim et al., 2021; Tariyah, 2020; Khairunnisa et al., 2022). Namun terlepas dari semua itu terdapat beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, diantaranya jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh *John Maynard Keynes* (1930 an) teori ekonomi makro teori ini berfokus pada peran permintaan *agregat* dalam menentukan output, lapangan kerja, dan inflasi dalam perekonomian. *Keynes* percaya bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengelola perekonomian, terutama selama masa resesi atau depresi, dengan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang permintaan *agregat* dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

## 1.3. Informasi masalah yang memerlukan informasi Kebijakan

Permasalahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo yang melambat sangat perlu menjadi perhatian pemerintah, hal itu sebagai alarm atau *signal* bagi Pemerintah Kabupaten Bungo karena pertumbuhan ekonomi menjadi cerminan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Bungo yang tidak dalam kondisi baik-baik saja dimulai pada Tahun 2024.

#### 1.4. Langkah-langkah yang pernah ditempuh.

Pemerintah Kabupaten Bungo selama Tahun 2024 dan tahun sebelumnya telah melaksanakan program kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bungo diantaranya adalah Program Pembangunan **Bidang Infrastruktur** seperti Pembangunan Jembatan, Peningkatan Jalan Pedesaan – Ke Kabupaten Bungo, Jalan Usaha Tani. **Bidang Ekonomi** : Pemberian Subsidi Bibit Kelapa Sawit, Bibit Padi, Jagung dan Cabe termasuk bibit sayur-sayuran, Jalan Usaha Tani melalui Pokir DPRD setempat serta program pembinaan UMKM.

Kebijakan masa lampau yang pernah dibuat yaitu mendorong perekonomian adalah pembangunan Infrastruktur jalan dan Jembatan, pemberian bantuan bibit tanaman perkebunan dan bibit tanaman Pangan serta pelatihan keterampilan.

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dibangun diharapkan akan dapat membantu masyarakat untuk memperlancar akses dari lokasi pertanian, perkebunan ke pusat-pusat pemasaran, industri pengolahan serta akses ke jalan Kabupaten dan Nasional..
2. Pemberian bantuan bibit Kelapa sawit bersubsidi dan pemberian bantuan tanaman pangan diharapkan dapat memberikan tambahan pekerjaan yang dapat memberi nilai tambah pendapatan atau *income* kepada masyarakat.
3. Pelatihan Keterampilan yang dilaksanakan di BLK dan Perindag diharapkan dapat menjadi modal peningkatan Sumber Daya Manusia.

## II. Rumusan Masalah (*Substantive Problem*)

### 2.1. Identifikasi masalah

Dari 5 item yang terdapat dalam PDRB Kabupaten Bungo, 3 item yang paling signifikan membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu Industri Pertambangan, Pedagang Besar Eceran Reparasi Mobil& Motor serta Pengadaan Listrik. Berdasarkan analisis penulis dari 3 item tersebut yang menyebabkan perlambatan ekonomi di Kabupaten Bungo adalah rendahnya serapan tenaga kerja yang disebabkan oleh menurunnya Sektor Pertambangan di Kabupaten Bungo, turunya sektor pertambangan akan menyebabkan menurunnya *agregat demand*. Sehingga sektor lain ikut berdampak seperti Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Motor, Pengadaan

Listrik dan Gas. Ini menandakan bahwa permintaan terhadap makan minuman dan barang lainnya ikut turun sehingga menurunkan sector produksi.

## **2.2. Rumusan masalah kebijakan**

Turunnya kinerja Sektor Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Bungo berdampak signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo, salah satu factor penyebabnya adalah dari kebijakan Pemerintah Pusat yang memperketat pemberian izin. tambang Factor lainnya adalah pemerintah daerah dan Aparat Hukum (APH) yang memperketat razia penambangan Ilegal IEmas Tanpa Izin (PETI).

## **2.3. Rumusan tujuan kebijakan.**

Dengan membuat kebijakan yang lebih menyentuh kepada tenaga kerja yang sebelumnya berprofesi sebagai pekerja tambang dan memperluas lapangan pekerjaan sebagai upaya menampung masyarakat yang bekerja sebagai penambangan Batu Bara maupun PETI di Kabupaten Bungo melalui program bantuan modal usaha UMKM dan Pendidikan Keterampilan yang siap masuk pasar kerja local maupun regional. Sejalan dengan pandangan Febriani & Putra Ramadani (2021) peran lembaga pemberdayaan dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting (Fuanida, 2012). (Marjaya, Indra. & Fajar, 2019) menyatakan bahwa usaha kecil penting untuk dikaji karena mempunyai peranan yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Hampir 90% dari total usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari UMKM.

## **2.4. Kriteria keberhasilan kebijakan**

Kriteria kebijakan dapat membuat indicator keberhasilan atau target yang dicapai pada tahun 2025 yaitu :

- a. Penurunan angka pengangguran terbuka dari angka 4,67 % turun ke angka 3,8 %.
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 3,30 % naik ke angka 4,6 %.

# **III. Alternatif Kebijakan**

## **3.1.Deskripsi alternative**

Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2026 harus membuat Kebijakan dengan program kegiatan pemabangunan ekonomi, utamanya adalah program kegiatan yang secara langsung menyentuh kepada tenaga kerja Produktif yang rendah skill, diantaranya adalah : 1). Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi mereka yang selama ini menjadi pekerja kasar *low skill* pada perusahaan Batu Bara) 2). Membantu permodalan seperti UMKM. 3). Menarik Investasi padat kerja di Kabupaten Bungo

### **3.2. Prakiraan hasil dari tiap-tiap alternatif**

Hasil yang dicapai dari dari kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program kegiatan bidang pendidikan dan keterampilan diharapkan akan dapat memiliki skill lain sebagai profesi baru dalam pekerjaan.
2. Berkembangnya dunia usaha atau UMKM di Kabupaten Bungo sebagai alternatif peralihan profesi bagi karyawan tambang
3. Dengan banyaknya perusahaan atau investasi di Kabupaten Bungo akan menyerap tenaga kerja dan mengairahkan sektor lain seperti rumah, makan/kuliner dan sektor lainnya. Senada dengan Apriliansah & Suyatno (2024) Investasi merupakan faktor krusial bagi kelangsungan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Investasi yang ditanamkan baik oleh pemerintah maupun swasta maka terjadi kegiatan produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

## **IV. Penilaian Alternatif**

### **4.1. Penilaian alternative**

Dari berbagai kebijakan program yang dimunculkan dapat diambil alternative.

- ✓ Program pendidikan dan pelatihan serta keterampilan akan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru yang akan menjadi profesi baru bagi mereka yang menganggur atau terkena PHK. Oleh karena itu perlu untuk ditingkatkan.
- ✓ Memberikan bantuan permodalan bagi UMKM akan dapat menyerap tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.
- ✓ Menarik Investasi ataupun Perusahaan akan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan *multiplier effect* bagi sektor lain.

#### **4.2. Perbandingan alternative.**

- ✓ Program pendidikan dan keterampilan yang digalakkan akan menyerap tenaga kerja terutama pengangguran usia produktif.
- ✓ Memberikan bantuan permodalan akan dapat menyerap tenaga kerja bagi usaha UMKM dan rumah tangga produktif
- ✓ Menarik Investasi besar-besaran dapat memberi perluasan lapangan pekerjaan dan *multiplier effect*
- ✓ Program peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan akan dapat meningkatkan kelancaran barang & Jasa.
- ✓ Meningkatkan Program pertanian dan perkebunan dapat memperluas lapangan pekerjaan.

### **V. Rekomendasi**

#### **5.1. Alternatif yang disarankan :**

- Pemerintah Kabupaten Bungo harus meningkatkan Program pendidikan dan keterampilan yang siap diterima pasar kerja.
- Pemerintah Kabupaten Bungo agar lebih berpihak kepada sektor UMKM dengan memberikan bantuan permodalan dan memfasilitasi swasta atau UMKM kepada pihak Perbankan untuk mendapat dana KUR.
- Pemerintah Kabupaten Bungo harus maksimal menarik Investasi/perusahaan yang banyak menyerap lapangan pekerjaan.
- Pemerintah terus menerus harus meningkatkan program pertanian melalui *intensifikasi dan diversifikasi* serta memodernisasi pola pertanian (Winarno, 2012-287).

#### **5.5. Langkah strategis yang dilakukan**

Melakukan kebijakan anggaran sebagai berikut :

- Meningkatkan Program sektor Pertanian dan Perkebunan.
- Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program kegiatan pendidikan keterampilan dibawah Balai Latihan Kerja (BLK), yang diterima pasar kerja.
- Mengalokasikan anggaran untuk program bantuan permodalan bagi kegiatan UMKM dan memfasilitasi pihak swasta keperbankan guna mendapatkan kucuran dana KUR.

- Membuat & melaksanakan kegiatan promosi daerah ke Pusat/Batam dan mengikuti pameran pada *event* nasional.

Muara Bungo, 25 September 2025

Penulis,

Dr. Muslim, S.IP, M.Si

Analisis Kebijakan Bappeda Kabupaten  
Bungo

## Daftar Pustaka

- Apriliansah, L., & Suyatno. (2024). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2401-2413.
- Febriani, W., & Ramadani, P. (2021, 06 30). Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(2), 88-95.
- Irawan, Raysharie, P. I., Tesalonika, Septianingsih, D., Samman, M., Satrio, M., et al. (2024, 1). Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 98-106.
- Keynes, J. M. (1930). Economic possibilities for our grandchildren. In *Essays in persuasion* (pp. 321-332). London: Palgrave Macmillan UK.
- Wijayanti, D., & Laksono, E. N. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kota Provinsi Lampung tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 10-15.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (1 ed., Vol. 1). (T. R. CAPS, Ed.) Jakarta: CAPS.